

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal :

- Abd al-Wahhab Khallaf. (1977). *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. Cairo: Dar al-Ansar.
- Abdullah, Sayidin. (2014). *Prinsip Efisiensi Dalam Tindak Pidana Perikanan*. Jakarta: Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8.
- Ahmad, M. Rais. (2013). *Penegakan Hukum Atas Keadilan Dalam Pandangan Islam*. Bogor: Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor.
- Al-Auqof Al-Kuwaitiyah. (t.t.). *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Bani, M. N. (2011). *Mukhtasar Shahih Muslim*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Mawardi, I. (2006). *Al-Ahkām As-Sulthāniyyah fī al-Wilāyah al-Diniyyah* (F. Bahri, Trans., 2nd ed.). Jakarta: Darul Falah.
- Amancik, S., Ayub, Z. A., Barus, S. I., & Ramadahani, S. (2024). Choices of law for democratic regional head election dispute resolution institutions in Indonesia. *Jambura Law Review*, 6(2).
- Arikunto, Suharmi. (1993). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astawa, I. Gede Pantja. (2008). *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Bogdan, R. C., & Taylor, S. J. (2012). *Prosedur penelitian*. Dalam M. Moleong (Ed.), *Pendekatan Kualitatif* (hlm. 4). Jakarta: Rineka Cipta.

- Buletin Dakwah, Al-Islam. (2014). Untuk Kita Renungkan. (t.t.p.) Hizbut Tahrir Indonesia, Edisi 701 Tahun XIX, 11 Jumadil Akhir 1435 H / 11 April 2014 M.
- Effrata. (2021). Landasan Hukum Pendidikan di Indonesia. Palangkaraya: Universitas PGRI Palangkaraya.
- Fahmi, Mutiara. (2017). Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an. (t.t.p.). Petita, Volume 2 Nomor 1.
- Hashela, Rizka Noor. (2020). Menyikapi Integritas Penyalahgunaan Hak Pilih Dalam Pemilu. Pelaihari: Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- Ichsan, Muchammad. (2015). Pengantar Hukum Islam. Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Indra Cahyadi & Budi Mulawan. (2019). Efektivitas dan Efisiensi Penegakan Hukum terhadap Aspek-Aspek Ekonomi di Indonesia (Berdasarkan Teorema Coase dan Pemikiran Posner). Jakarta: Universitas Al-Ahzar Indonesia.
- Irfani, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. Jurnal Legislasi Indonesia.
- Kementerian Agama RI. (t.t.). Al-Qur'an dan Terjemah, Qs. Ali Imron (104). Bekasi: Cipta Bagus Segara.
- Latipulhayat, Atip. (2017). Editorial: Due Process of Law. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2.
- Lubis, Todung Mulya. (2002). Pemilu 2024 Tanpa Pengawasan. (t.t.p.).
- Marzuki. (1991). Metodologi Riset. Yogyakarta: BPFE-UII.

- Mathar, Ahmad. (2023). Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan. Tanjung Jabung Barat: ejournal An-Nadwah.
- Moho, Hasaziduhu. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa.
- Muchsan, SH. (1992). Sistem Pengawasan terhadap Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Musfialdy. (2012). Mekanisme Pengawasan Pemilu di Indonesia. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Pidarta, Made. (2013). Landasan Kependidikan Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Rosidin, Utang. (2024). Penguatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Penegakan Hukum Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Jurnal Litigasi.
- Samuddin, Rapung. (2013). Fiqih Demokrasi: Menguk Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik. Jakarta: Gozian Press.
- Sidik, Ali. (2025). Pengawasan Pemilu dan Peran Mahasiswa. Lampung: Bawaslu Provinsi Lampung.
- Soekanto, Soeryono. (1990). Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris. Jakarta: Indie Hill.
- . (2004). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Penerbit Rajawali Pres.
- . (2007). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

------. (2012). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.

Sodikin. (2014). Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan. Bekasi: Gramata Publishing.

Sugiyono. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Suteki & Galang Taufani. (2018). Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik). Jakarta: Rajawali Press.

Syarifuddin & Sandi, A. (2018). Penguatan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Tindoo, Sri Yatni. (2024). Kekuatan Hukum Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Bolaang Mongondow Selatan: JDIH.

Peraturan Perundang-Undangan :

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Artikel / Website :

Agneska, Dobrzynska. (2006). *Enforcement of Electoral Integrity*.
<http://aceproject.org/aceen/topics/> . Diakses tanggal 16 Maret 2025.

Aryandani, Renie. (2024). Perbedaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Pidana Pemilu, dan Sengketa Pemilu.
https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pelanggaran-administratif-pemilu-pidana-pemilu-dan-sengketa-pemilu-lt65b248d363d2e/#_ftnref8 . Diakses pada 16 Maret 2025.

Badan Pemeriksa Keuangan. (t.t.) <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-trenggalek/> . Diakses pada 13 Februari 2025.

Bawaslu Kabupaten Trenggalek. (t.t.).
<https://trenggalek.bawaslu.go.id/> . Diakses pada 18 Februari 2025.

Diniar, Mellyna Putri. (2024). Pasangan Prabowo-Gibran Kembali Unggul di Pemungutan Suara Ulang di Trenggalek.
<https://www.jawapos.com/nasional/014206500/pasangan-prabowo-gibran-kembali-unggul-di-pemungutan-suara-ulang-di-trenggalek> . Diakses pada 22 April 2025.

Dwi, Anugrah. (t.t.) Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum.
<https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/#:~:text=Indonesia%20sebagai%20negara%20hukum%20memiliki,yang%20berlaku%20di%20wilayah%20NKRI> .
 Diakses pada 23 April 2025

Fitrat, Irfan. (2024). Dua TPS di Trenggalek Diusulkan Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu.
<https://rejogja.republika.co.id/berita/s90ffe432/dua-tps-di-trenggalek-diusulkan-pemungutan-suara-ulang-ini-kata-bawaslu> . Diakses pada 23 April 2025

Humas KPU RI Tenri. (t.t.) Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah Pemilih Pindahan Yang Sudah Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11767/daftar-pemilih-tambahan-dptb-adalah-pemilih-pindahan-yang-sudah-terdaftar-dalam-daftar-pemilih-tetap> . Diakses pada 16 Maret 2025.

Imron, Muchammad. (t.t.). Transparansi Hukum Sebagai Bentuk Terlaksananya Sistem Hukum yang Adil dan Benar. <https://www.kompasiana.com/muchimran228/657d6a3212d50f197467ba92/transparansi-hukum-sebagai-bentuk-terlaksananya-sistem-hukum-yang-adil-dan-benar> . Diakses pada 23 April 2025

Mutttaqin, Adhar. (2024). Ada Pemilih Ilegal, Bawaslu Trenggalek Rekomendasikan Coblos Ulang 2 TPS. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7197851/ada-pemilih-ilegal-Bawaslu-trenggalek-rekomendasikan-coblos-ulang-2-tps> . Diakses pada 29 September 2024, 22 April 2025, dan 23 April 2025.

Prabowo, Imam. (t.t.). Paradigma Peraturan Mahkamah Agung: *Modern Legal Positivism Theory*, Teori Hukum Progresif Dan Urgensi Kodifikasinya. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/paradigma-peraturan-mahkamah-agung-modern-legal-positivism-theory-teori-hukum-progresif-dan-urgensi-kodifikasinya-oleh-imam-prabowo-s-h-19-10#:~:text=Adagium%20tersebut%20menjelaskan%20bahwa%20hukum,berubah%20drastis%20seiring%20perkembangan%20zaman> . Diakses pada 23 April 2025.

Rahman, Muhamad Hanif. (2024). Peringatan bagi Petugas Pemilu yang Curang dalam Syariat Islam. <https://nu.or.id/syariah/peringatan-bagi-petugas-pemilu-yang-curang-dalam-syariat-islam-0dy4q> . Diakses pada 11 November 2024 dan 17 Maret 2025.

Samego, Indria. (t.t.). www.dosen.uta45jakarta.ac.id . Diakses pada 24 April 2025.

Sujarwoko, Destyan H. (2024). Prabowo menang kembali pada pemungutan suara ulang Trenggalek. <https://www.antaranews.com/berita/3975918/prabowo-menang-kembali-pada-pemungutan-suara-ulang-trenggalek> . Diakses pada 22 April 2025.

Sumber Wawancara :

Wawancara dengan Bapak Rusman Nuryadin, M.Pd. selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek pada tanggal 3 Februari 2025.

Wawancara dengan Bapak Fatwa Marurianto, S.Pd. selaku Staf Hukum (PPNPN) Bawaslu Kabupaten Trenggalek pada tanggal 27 Februari 2025.

Wawancara dengan Bapak Farid Wadjdi, S.H., M.H. selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Datin (Data dan Informasi) Bawaslu Trenggalek pada tanggal 27 Februari 2025.